



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TANTANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Achmad Muchaddam Fahham

Analisis Legislatif Ahli Madya
achmad.fahham@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada *Opening Ceremony* (PT Bank Syariah Indonesia) *BSI International Expo 2024*, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam bentuknya yang konkret, ekonomi dan keuangan syariah mengacu pada industri halal, yakni kegiatan produksi, distribusi, dan penyediaan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal Islam. Pengembangan industri halal sebagai arus baru pertumbuhan ekonomi nasional penuh dengan tantangan, sehingga diperlukan strategi pengembangan. Kajian singkat ini berupaya mendeskripsikan tantangan dan strategi pengembangan industri halal di Indonesia.

Berdasarkan jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai 241,7 juta atau 89,02% dari populasi Indonesia maka industri halal Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang. Menurut *World Halal Summit 2022*, Indonesia merupakan satu aktor utama dalam industri halal global. Meskipun demikian pengembangan industri halal menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang ketat. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan kewajiban halal produk industri makanan dan minuman per 17 Oktober 2024. Akan tetapi hingga saat ini belum semua produk industri tersebut tersertifikasi halal. Menurut data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, per Februari 2024, tercatat sebanyak 822 industri kecil sektor makanan dan minuman telah terverifikasi dalam pengajuan fasilitas sertifikasi halal gratis dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Salah satu sebabnya adalah karena proses sertifikasi halal seringkali memerlukan waktu dan biaya yang signifikan terutama bagi produsen kecil dan menengah. Meningkatkan efisiensi proses sertifikasi adalah salah satu langkah yang perlu diambil untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri ini. Selain itu, penting untuk mengatasi masalah keberlanjutan dalam industri halal. Adakalanya, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dalam produk halal masih belum menjadi prioritas. Pemikiran ke depan yang berfokus pada keberlanjutan akan membantu menciptakan produk halal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen saat ini, tetapi juga memastikan lingkungan yang sehat untuk generasi mendatang. Tantangan lainnya ialah meningkatkan pemahaman tentang standar halal di kalangan produsen dan konsumen. Semakin banyak orang yang memahami arti dan pentingnya sertifikasi halal, maka semakin besar permintaan untuk produk halal. Pemerintah dan pihak berkepentingan perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman ini.

Menurut *Master Plan* Industri Halal Indonesia 2023-2029, setidaknya ada empat strategi yang perlu diterapkan dalam pengembangan industri halal di Indonesia, yakni *pertama*, peningkatan produktivitas dan daya saing, strategi ini dilakukan melalui empat program utama, yaitu penguatan rantai nilai halal; pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing; penguatan pelaku industri halal yang mencakup Industri/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (I/UMKM) dan pesantren, serta penguatan inkubasi *startup* bisnis halal berbasis

inovasi dan teknologi; dan peningkatan riset dan inovasi. *Kedua*, penerapan serta penguatan kebijakan dan regulasi, terdiri dari dua program utama, yaitu penguatan industri halal melalui dukungan kebijakan dan regulasi yang memiliki kecukupan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan; dan penerapan sistem jaminan produk halal (sertifikasi dan *traceability*). *Ketiga*, penguatan keuangan dan infrastruktur, mempunyai tiga program utama, yaitu dukungan keuangan syariah yang inklusif; penguatan infrastruktur industri halal; dan penyusunan indikator dan database industri halal oleh otorita data nasional. *Keempat*, penguatan halal *brand and awareness*, meliputi dua program utama, yaitu peningkatan preferensi sosial dan halal *lifestyle* melalui promosi dan edukasi; dan terjalannya hubungan diplomasi ekonomi internasional dalam bidang industri halal. Implementasi strategi-strategi tersebut, diharapkan industri halal di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing di pasar global, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, dalam rapat kerja dengan pemerintah:

1. Komisi VIII DPR RI perlu mengingatkan Kementerian Agama Republik Indonesia dan beberapa kementerian terkait serta lembaga yang ada kaitannya dengan proses sertifikasi halal untuk mempercepat proses sertifikasi halal sektor industri kecil produk makanan dan minuman agar target pada 17 Oktober 2024 seluruh industri kecil sektor makanan dan minuman telah memiliki sertifikat halal.
2. Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk mengajak industri besar berkolaborasi melaksanakan sosialisasi dan edukasi kewajiban sertifikasi halal. Sosialisasi dilakukan dengan menysasar seluruh pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah hingga besar, serta *stakeholders* dan masyarakat luas.
3. Komisi VIII DPR RI perlu mengingatkan Kementerian Agama Republik Indonesia soal target 10 juta produk bersertifikat halal dan meningkatkan pelatihan pendamping proses produk halal.

Sumber

bpjph.halal.go.id, 6 Maret 2024;
indonesia.go.id, 28 Februari 2024;
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023;
kumparan.com, 30 Oktober 2023;
Rakyat Merdeka, 20 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.